

MODERASI EKONOMI ISLAM:
Analisis Kepemilikan Dalam Bingkai Tarkib Idāfī
Oleh: M. Wiyono

ABSTRAK: *Sistem kepemilikan dalam al Qur'an, bila dilihat dari satu perspektif nampak sekali Islam mendorong kepemilikan individu. Namun dari perspektif yang berbeda, ayat-ayat yang mendorong kepemilikan kolektif juga bertebaran dimana-mana. Untuk menjawab ambiguitas di antara dua mazhab kepemilikan di dunia tersebut, makalah ini akan mengkaji secara holistik ayat māl. Langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah menggunakan manhaj al-adabī. Sebuah upaya penafsiran yang digali dari perspektif kebahasaan.*

Kata Kunci: Ekonomi Islam, moedarasi, manhaj al-adabī

LATAR BELAKANG

Persoalan ekonomi dalam ranah kehidupan menempati posisi penting, tak heran bila seorang ekonom selalu kekuarangan lembaran untuk menuliskan konsep ekonomi yang anggap efektif, efisien dan praktis. Kajian konseptual di bidang ekonomi dibutuhkan dalam rangka membentuk kesejahteraan. Sedemikian pentingnya kajian ekonomi, sehingga al Qur'an dalam penyebutan harta (*māl*) melebihi penyebutan *nabīy* dan *wahy*. Bila sepakat bahwa probabilitas kemunculan kosa kata dalam al Qur'an berbading lurus dengan urgensinya terhadap kajian yang ditunjuk melalui kosa kata tersebut, berarti diskursus kajian ekonomi lebih penting ketimbang kenabian dan wahyu. Bila tidak pun, cukup kiranya untuk memberikan perhatian bahwa persoalan ekonomi adalah persoalan yang mutlak dibutuhkan.

Dapat disimplifikasi bahwa peta mazhab pemikiran ekonomi dunia bertumpu pada dua 'kaki' besar yaitu sosialis dan kapitalis. Keduanya mempunyai konsep berbading terbalik baik dari segi produksi, kepemilikan dan fungsionalisasi kepemilikan tersebut. Kendatipun demikian, baik sosialis maupun kapitalis, keduanya mempunyai arah tujuan yang ssama, yakni sama sama melakukan klaim sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Beranjak dari pemetaan sederhana ini, anggitan penulis mengajak pembaca melakukan 'tamasya' intelektual melihat posisi ekonomi Islam dari perspektif kepemilikan laik untuk terus dilanjutkan.

PEMBAHASAN

Istilah kapitalisme,¹ diartikan sebagai sistem ekonomi yang mendasarkan pada azas kebebasan pribadi dalam kepemilikan harta.² Kebebasan tersebut diamini oleh Cambell Black, menurutnya harta adalah sebuah milik individu yang dilindungi pemerintah dan bersifat absolut.³ Oleh karena harta adalah milik individu semata, akibat yang ditimbulkan adalah melahirkan perilaku pengumpulan harta yang bersifat berlebihan. Bila hal ini terjadi merambah dibanyak wilayah, maka ketimpangan social-ekonomi dan persaingan tajam yang berujung disharmonis sosial tak bisa dielakkan. Kondisi demikian ini bertentangan dengan prinsip al-Qur'an yang menghendaki supaya harta tidak hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja.⁴ Sekalipun harus diakui secara obyektif, bahwa kapitalis membuktikan dirinya meningkatkan produktifitas, kreatifitas dan kompetitif, sayangnya monopoli.⁵ Bila demikian maka dapat diyakini bahwa konsep kepemilikan dalam sistem kapitalis bertentangan dengan 'ruh' pemerataan dalam al Qur'an. Dengan kata lain, Islam bukan duduk berbantal kaki mazhab ekonomi kapitalis.

Adapun terminologi sosialis,⁶ merupakan kebalikan dari kapitalis. Sistem ekonomi sosialis, menghendaki kesamaan dalam kepemilikan.⁷ Asumsi prinsip sosialis adalah menyamakan kepentingan semua orang dalam target kebutuhan ekonominya, baik proletar maupun borjuis. Perbedaan keduanya hanya terletak pada kesempatan dan peluang yang membedakan di antara keduanya. Dalam hal ini negara diposisikan sebagai lembaga formal

¹ Dari segi nama, kapitalisme berasal dari kata *capita* berarti modal dan *isme* adalah suatu faham atau ideologi. Kapitalisme bisa disebut dengan modal-isme yakni suatu paham ekonomi yang berdasarkan modal, lebih lengkap, kapitalisme adalah sistem ekonomi dimana barang dan jasa sebagai entitas non-negara diperjualbelikan di pasar dari unit terkecil hingga global. Mulai berkembang di Inggris abad 18 Masehi, kemudian menyebar ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara, Soetrisno, *Kapita Selekt Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), 186.

² M.A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, terj. Potan Arif Harahap (Jakarta: Intermasa, 1992), 332

³ Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Publishing.co, 1998), 1383.

⁴ QS. al-Hasyr: 7, lihat penjelasannya, Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia.", 318.

⁵ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori.*, 313

⁶ Sosialisme muncul di Prancis sekitar tahun 1830, kata ini identik dengan komunis. Dua kata ini hampir bersamaan, hanya saja komunis biasa dipakai oleh kaum sosialis yang lebih radikal, yang menuntut penghapusan secara total hak milik pribadi. Fran Magnis Suzeno (ed.) *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: P.T Gramedia, 1999), cet. i, 18.

⁷ Pada prinsipnya, sistem ini tidak mengakui adanya kemerdekaan memiliki, sehingga tidak ditemukan cerminan citra diri secara spiritual, seperti; pemurah, kikir dan sederet sifat yang serupa Fran Magnis Suzeno (ed.) *Pemikiran Karl Marx.*, 7.

dan pengatur wilayah publik, adapun agama tidak termasuk di dalamnya, karena agama menjadi wilayah merupakan wilayah pribadi. Ide utama dalam sosialis adalah kolektivitas, kebersamaan dan kepatuhan terhadap negara.

Sistem kepemilikan sosialis berbanding seratus delapan puluh derajat dengan kepemilikan dalam konsep kapitalis. Konsep kepemilikan sosialis bermaksud menghapus kebebasan kepemilikan kemudian menggantinya dengan kepemilikan bersama, pendek kata, kepemilikan pribadi tidak mendapat ruang yang luas, kecuali kebutuhan sandang, papan dan pangan. Bahkan sosialisme klasik tidak memberikan apapun kecuali kepemilikan bersama dalam segala hal. Prinsip kepemilikan semacam ini, bertentangan dengan naluri 'memiliki', padahal dengan jelas al Qur'an mengakui hal itu. Isyarat yang mengarah ke sana misalnya karakter manusia mencintai harta, bekerja keras untuk memperoleh sesuatu, anjuran untuk memberi, berupa zakat, infak, sedekah berarti ia telah terlebih dahulu memiliki. Contoh tersebut adalah sebagian kecil sebagai dalil bahwa Islam tidak sebangun dengan konsep ekonomi sosialis. Bila mazhab penguasa pemikiran ekonomi dunia dipetakan dalam bentuk sosialis dan kapitalis sedangkan Islam tidak berada diantara keduanya, pertanyaan selanjutnya adalah, dimanakah sebenarnya posisi kepemilikan dalam Islam?

A. Kepemilikan dalam Islam

Hak milik secara umum diartikan sebagai memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya.⁸ Ali al-Khafifi mendefinisikan kepemilikan adalah suatu kekhususan menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain dapat memanfaatkannya.⁹ Menurut Wahbah Zuhailiy, kepemilikan adalah hubungan seseorang dengan harta benda yang disahkan oleh syara',¹⁰ di sana ada peran etika dan moral spiritual yang erat kaitannya dengan perilaku ekonomi dalam memperlakukan harta kepemilikan. Sedangkan, Taqiyuddin an-Nabhani berpendapat, bahwa hak milik dan sumber daya alam harus dikelola sesuai dengan syara' agar tidak berebut sesama anggota masyarakat.¹¹

Mengamati definisi di atas, menggiring penulis kepada kesimpulan bahwa, kepemilikan adalah penguasaan seseorang terhadap sesuatu yang diakui oleh syara' sehingga orang lain tercegah untuk menguasainya. Definisi

⁸ Rahmat S. Labib, *Privatisasi dalam Pandangan Islam* (Tangerang: WADI Press, 2005), 68.

⁹ Ali al-Khafifi, *Mukhtashar Ahkām al-Mu'āmalah as-Syar'iyah*, (Kairo: Maṭba'ah, 1952), 9

¹⁰ Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Beirut: Dārul al-Fikr, 1985), 283.

¹¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nizhām al Iqtisādī fī al-Islam*, (Beirut: Dr al ummah, 2004), 201

tersebut mengindikasikan adanya perlakuan yang khusus terhadap hak miliknya. Dalam sistem ekonomi hubungan antara benda yang dikuasai dengan aktifitas perlakuannya disebut dengan tindakan ekonomi, dengan demikian kajian ekonomi dengan nilai moral sangat berkaitan. Eugene lovell atau Schumacher dan para ekonom lainnya telah menyadari sepenuhnya, bahwa meniadakan hubungan kajian ekonomi dengan nilai moral-humanis adalah salah satu kesalahan besar dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia dan alam semesta.¹²

Al-Qur'an mengapresiasi kepemilikan bagi setiap individu sebagai bentuk *reward* hasil kerjanya, bahkan mendorong berlomba-lomba memperoleh harta untuk dimanfaatkan sebagai sarana beribadah. Memiliki harta dianggap sebagai keinginan yang lazim dan manusiawi.¹³ Namun perlu diingat, hak kepemilikan secara mutlak dan absolut. Hak milik absolut dunia seisinya adalah Allah,¹⁴ yang diserahkan kepada manusia untuk dikelola dan didistribusikan dengan adil sesuai aturan syara'. Oleh karena itu, fungsi harta sesungguhnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Karena itu, dalam manajemen hak pakai, setiap individu tidak dibenarkan melakukan tindakan sia-sia (*mubāzīr*) atau menyerahkan pengelolaan harta kepada orang-orang yang tidak cakap secara syara'.¹⁵ Kendatipun secara legal formal harta tersebut miliknya. Hal ini dimaksudkan supaya perilaku ekonominya tidak mengakibatkan kerugian pihak lain.¹⁶

Setiap manusia diperbolehkan memiliki, menikmati, memindah-tangankan kepemilikan. Namun di sisi lain, mereka juga dibebani menanggung kekurangan orang lain melalui mekanisme zakat, infak dan sedekah.¹⁷ Fungsi ini dilakukan melalui semangat pesan moral al-Qur'an itu

¹² M. Ahmad, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 58.

¹³ Penyebutan harta dan anak dalam sebuah ayat, selalu mendahulukan penyebutan 'harta' misalnya QS. al-Kahfi: 46 dan QS. an-Nisa: 14, oleh Dr. Musa Syahin, ditangkap sebagai isyarat kecintaan manusia terhadap harta terkadang berlebihan, melebihi kecintaan kepada keluarga. Lihat. Dr. Musa Syahin, *al-Māl fī al-Qur'ān wa al-Sunnah*, (tt.), 55

¹⁴ ...berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.... QS. al-Nūr: 33

¹⁵ Dalam kajian fiqh, seseorang yang dianggap tidak cakap membelanjakan harta disebut dengan *al-hajru* (tercegah) antara lain; anak-anak, orang yang tidak sehat akalnya (*majnūn*), bangkrut (*mufliṣ*), orang tua yang sudah pikun (*syaiḥun haramun*). Dalam menafsirkan an-Nisa':5 Abul Faraj Ibn Jauzi (w. 597 H) --mengutip beberapa pendapat ulama'--, cerdas dalam arti memiliki kemapanan dalam beragama dan mampu menjaga harta dengan kecerdasan akalnya. Lihat, Abul Faraj Ibn Jauzi, *Zādul Masīr fī 'Ilmi at-Tafsīr* (Beirut: Dār al-Kutub, 1422 H), juz. i, 371.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *membumikan al Qur'an* (Jakarta: Penerbit Mizan, 1998) cet. xviii, 303.

¹⁷ M.A, Mannan, *Ekonomi Islam Teori.*, 56.

sendiri yang menekankan ide-ide keadilan ekonomi.¹⁸ Dari sini, pemahaman terhadap ide kepemilikan harta secara bersama --dalam batas tertentu-- dibentuk. Aturan manajemen ini dibuat dalam rangka menghindari perbuatan monopoli dan penimbunan harta. Dengan aturan tersebut diharapkan lahir sifat dermawan dan tanggung jawab sosial untuk melakukan pemerataan yang mekanismenya secara aplikatif telah diatur dalam konsep zakat, infak, sedekah, hibah waris dan sejenisnya.¹⁹ Paparan di atas adalah landasan pemerataan melalui analisis konten (*content analysis*). Lebih jauh, sebagai alternatif memperkuat argumentasi kepemilikan dalam Islam juga digunakan pisau analisis linguistik dengan cara mengamati struktur penggunaan al Qur'an dalam penyebutan kata *māl*.²⁰ Berikut akan dipaparkan secara singkat landasan teoritis dan praktisnya.

B. Kajian Teoritis *Tarkīb Idāfīy*

Sebelum mendalami pesan kepemilikan harta perspektif Islam di mana al-Qur'an sebagai landasan epistemologisnya, penulis anggap perlu jelas terlebih dahulu kajian teoritis *tarkīb idāfah*. *Tarkīb idāfāt* adalah rangkaian dua kata yang disatukan dan mempunyai makna satu yang lebih khusus. Menurut al-Anbari (w.577H) bentuk penisbatan atau *idofiy* menyimpan kata yang menunjukkan milik (*li*) atau dari (*min*),²¹ Dalam hal ini pakar bahasa umumnya membagi menjadi dua macam. *Pertama*, *idāfah mahḍah* penisbatan kata benda yang disandarkan kepada kata benda misalnya 'cincin besi' yang merupakan penyatuan dua kata cincin dan besi. Pola penisbatan seperti ini mengandung makna kepemilikan.²² Oleh karena itu, Ibn Shaigh menyebutnya dengan *idāfat al-milk*.²³ *Kedua*, *idāfah ghayru mahḍah* yaitu apabila kata benda disandarkan dengan kata yang mengandung arti sifat, misalnya baju sutera yang merupakan penyatuan dari dua kata baju dan sutera. Pola penisbatan semacam ini mengandung arti pembentukan, oleh sebab itu, bisa juga disebut sebagai *idāfah jinsi*.²⁴ Penisbatan kalimat dalam jenis ini sangat banyak sekali kita temui di dalam al Qur'an, tentunya punya implikasi juga

¹⁸ Fazlurrahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), cet. ii, 36.

¹⁹ Sa'id Abdurrahman, *Musykilāt al-faqr* (Riyadh: Dirasāt al-amniyah, 1411), 58.

²⁰

²¹ Abi Sa'id al-Anbari, *Asrār al-'Arabiyyah* (Beirut: Dār al-Arqam, 1999), 206.

²² Abul Abbas Al-Mabarrad, *al-Muqtaḍab* (Beirut: 'Alam al-Kutub, tt), iv, 143. Lihat, Abu Qasim al-Zujaji, *al-Lāmāt* (Damaskus, Dār al-Fikr, 1985 M), 32, Muhibuddin al-'Akabiri, *al-Lubāb fī 'Ilal al-Bina' wa al-I'rāb* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1995), 389.

²³ Syamsuddin al-Shaigh, *al-Lumḥah fī Syarh al-Mulḥah* (Madinah: Imadah al-Baḥs al-Ilmi, 2004), 274.

²⁴ Abi Sa'id al-Anbari, *Asrār al-'Arabiyyah*, 206, lihat. Ibn Sarraj, *al-Uṣul fī an-Naḥwī*, 5.

dalam penafsirannya. Perlu ditambahkan di sini, bahwa ada juga penisbatan kata yang menunjukkan arti ‘di dalam’ namun hal ini diperselisihkan.²⁵

Aplikasi kajian teoritis diatas akan sangat berpengaruh terhadap kesan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu. Dalam hal ini, penulis akan mencoba untuk menerapkannya dengan ayat *māl* sebagai salah satu kosa kata yang paling tepat untuk menggambarkan kepemilikan terhadap harta. Kemudian akan kita analisa menggunakan pendekatan al-adabi untuk mendapatkan kesan dari susunan terkib tersebut terkait tema moderasi konsep ekonomi Islam.

Kata *māl* tersusun dari huruf *ma-ya-la* yang berarti condong terhadap sesuatu atau miring.²⁶ Dengan demikian harta berarti suatu barang yang dikuasakan kepada seseorang, yang menurut kebiasaannya semua manusia ingin menyimpan, memanfaatkan pada saat dibutuhkan.²⁷ Sependapat dengan Ibnu ‘Abidin, *al-māl* adalah segala sesuatu yang sangat dicintai oleh tabiat manusia pada umumnya, dimungkinkan untuk bisa disimpan hingga saat dibutuhkan.²⁸ Adapun menurut Wahbah Zuhailiy, harta adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan dikuasai (*hiyazah*) dengan sebuah upaya (*fi’il*) baik dalam bentuk barang maupun manfaat,²⁹ berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi yang membatasi definisi harta terbatas pada persoalan material belaka.³⁰ Dapat disimpulkan, Definisi harta (*māl*) adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki, dikuasai, dan dapat dimanfaatkan menurut syara’ serta dapat diukur dengan satuan moneter. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa,³¹ ada dua

²⁵ Ibn Malik menganggap banyak ahli nahwu yang melupakan bahwa adapula yang menunjukkan makna ‘di dalam’ seperti *arba’ati asyhur*, *makru al-layli*, Lihat. Abdullah Jamaluddin, *Syarh Tashīl al-Fawāid*, tahqīq. Abdurrahman al-Sayyid, (ttp: Hajar, 1990), iii, 221.

²⁶ Husein Ahmad Faris bin Zakariya, *Mu’jam Maqāyis fī al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr), 971. menurut Nasroen Harun, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan dipelihara dalam bentuk materi maupun manfaatnya, lihat, Nasroen Haroen, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 73.

²⁷ Muhammad Amim Ihsan al Mujaddidi al Barkati, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 191.

²⁸ Ibnu Abidin, *Hashiyah Raddul Mukhtar* (Beirut: Dār al-Fikr), Jilid iv, 3.

²⁹ Sinar matahari meskipun bisa dimanfaatkan namun tidak termasuk dalam kategori *māl*, begitu pula kesehatan, ilmu pengetahuan, prestasi atau sejenisnya, karena tidak berwujud materi, meskipun semua itu bisa dimiliki. Lihat, Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu.*, iv/40.

³⁰ Ulama’ Hanafiyah muta’akhirin berbeda dengan pendahulunya, mereka lebih cenderung mengikuti ulama’ terdahulu dengan alasan terkadang manfaat justru menghasilkan penambahan harta lebih banyak daripada bendanya itu sendiri setelah beberapa waktu. Rizal, ” Eksistensi Harta Dalam Islam.” *Jurnal Penelitian*, (Vol.9, No. 1, Februari 2015), 96.

³¹ Az-Zarqa’ adalah salah satu tokoh mazhab Hanafiyah muta’akhirin, lihat. Rizal, *Eksistensi Harta Dalam Islam.*, 96.

prasyarat yang harus dipenuhi dalam definisi harta (*māl*) yaitu harus berwujud materi dan bisa diraba atau dikuasai.³²

Ayat al-Qur'an term '*māl*' terulanga sebanyak 86 kali dalam berbagai bentuknya, tersebar di dalam 36 surat makiyah dan madaniyah,³³ Menurut pengamatan Hassan Hanafi, dari komposisi tersebut yang paling banyak adalah dalam bentuk jama', terulang sebanyak 61 kali dengan komposisi bentuk tunggal (tidak *muḍaf*) sebanyak 9 kali, selebihnya disandarkan kepada bentuk kata lain; *amwāl an-nās*, *amwālunā*, *amwāl al-yatāma*, *amwālihim*, *amwālukum*.³⁴ Dari sekian penisbatan yang ada, kita dapat simpulkan bahwa secara keseluruhan berupa *iḍāfah al-milk* sebuah penisbatan yang mengandung makna kepemilikan. Bila dikatakan *amwāl al-nās*, berdasarkan teori *iḍāfat* dapat diartikan *amwāl li al-nās* (harta milik manusia), begitu pula bila dikatakan *amwāluna* begitupula dengan kata *amwālihim* dan *amwālukum*. Misalnya dalam al Qur'an

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. al-Dzariyat:19)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), (QS. al-Ma'arij: 24-25)

³² Badruddin Najiy, *Mabāḥith fī Tafsīr al-Mauḍu'ī* (Suriah: Baromalah), 110. Bandingkan dengan Tim penyusun P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2011), 75.

³³ Perhitungan tersebut dicari dari kitab indeks, karya M. Fuad Abd Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfāḍ al-Qur'āni al-Karīm* (Mesir: Dār al-Kutub, 1945), 682-683.

³⁴ Dalam bentuk *jama'* yang berdiri sendiri terulang sebanyak 9 kali, *amwāl al-nās* 4 kali; QS. al-Baqarah:261, al-Nisa':161, al-Taubah:34, al-Rūm:39; disandarkan kepada kata ganti orang pertama *amwāluna* sebanyak 2 kali; QS. Hud:87, QS. al-Fath:11; satu kali yang disandarkan secara langsung kepada anak yatim *amwāl al-yatāmā*: QS. al-Nisa':10. Kemudian, *amwālihim* tersebar di 12 surat, al-Baqarah 4 kali, Ali 'Imrān 2 kali, al-Nisa' 9 kali, al-Anfāl 2 kali, al-Taubah 8 kali, selebihnya tersebar di tujuh surat; Yunus: 77, al-Dhāriyāt: 19, al-Mujādalah: 18, al-Ma'ārij: 24, al-Aḥzāb: 27, al-Ḥujurāt: 15, al-Ḥasyr: 8 masing masing satu ayat, *amwālukum* Terulang sebanyak 13 kali, tersebar di 10 surat; QS, al-Baqarah 2 kali, al-Nisa': 3 kali, Ali Imrān: 186, al-Anfāl: 28, al-Taubah: 41, al-Nūr: 37, Muhammad: 36, al-Ṣaff: 11, al-Munāfiqūn: 9, dan al-Taghābun: 15 masing masing satu ayat. Kesemuanya dpergunakan dalam kontek yang beragam. Dalam perhitungan lebih rinci sangat disarankan untuk merujuk kepada, Hasan Hanafi, *ad-Dīn wa al-Thawrah fī Miṣr (1952-1981)*; *Al-Yamīn al-Yasār fī al-Fikr al-Dīnī* (Kairo: Maktabah Madbūlī, tt). 123

Prof. Dr. Quraish Shihab memberikan komentar atas analisis Hasan Hanafi terhadap kata *māl* dalam *al-Dīn wa at-Thawrah*, bahwa harta harus memiliki fungsi sosial dan bahwa siapa saja yang egois sehingga menahan hartanya dan menganggap harta adalah milik pribadinya, maka dia akan tampil menyesal di Hari Kemudian.³⁵ Dengan kajian *al-adabī* semacam ini, ada kesan kesan seolah-olah harta adalah milik bersama. Terlebih lagi bila merujuk kepada perintah berbagi seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Prinsip-prinsipnya jelas lebih memiliki kedekatan epistemologis dengan prinsip kepemilikan dalam sistem ekonomi sosialis. Sebaliknya, bila kita melihat ayat-ayat *māl* yang dinisbatkan kepada pronoun tunggal secara keseluruhan menunjukkan adanya kecaman. Semua kata *māl* yang disandarkan kepada kata ganti (*pronoun*) ketiga tunggal terulang 6 kali,³⁶ semuanya berbicara dalam konteks kecaman, kecuali dalam QS. al-Lail:18, (الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى). Ayat ini menunjuk kepada pujian kepada kepemilikan pribadi yang dinafkahkan (di jalan Allah) untuk membersihkannya. Lebih jauh, Ibnu Abbas memberikan penjelasan, ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar yang menyumbangkan hartanya untuk kepentingan *jihād fī sabīlillāh*. Sedangkan, Muhammad bin al-Farra' al-Baghawiy (516 H) berpendapat, ayat tersebut berupa pujian yang ditujukan kepada Abu Bakar atas pembebasan Bilal bin Rabah dari siksaan tuannya Umayyah bin Khalaf untuk dimerdekakan,³⁷ Sedangkan menurut Abdul Qadir Jaelani dalam tafsirnya, ayat tersebut berkaitan dengan pujian terhadap pemilik harta karena sedekah di jalan Allah dalam rangka ingin memperoleh ridha-Nya.³⁸

Selain itu, bila kita merujuk terhadap dorongan al Qur'an terhadap etos kerja ummatnya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, bekerja keras, bertebaran dalam mencari karunia Allah, merupak prinsip-prinsip yang kental dengan kepemilikan pribadi, dalam arti al Qur'an juga disatu sisi berprespektif kapitalis. Dari dua hal yang berlawanan ini dapat disimpulkan, bahwa pemahaman al Qur'an terhadap kepemilikan bersifat unik dan moderat. Satu sisi menapak di 'kaki' sosialis, di sisi lain juga bertumpu di 'kaki' pemikiran sosialis. Dari pengamatan tersebut dapat dikatakan bahwa kepemilikan dalam

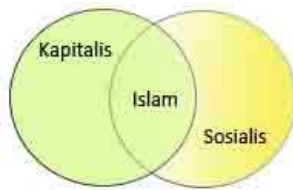
³⁵ M. Qurasih Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013) cet.ii, 376.

³⁶ Bentuk penisbatan kepada kata pronoun ketiga tunggal (*māluhū*) terdapat dalam QS. al-Baqarah: 264, Nuḥ: 21, al-Layl: 11,18, al-Humazah: 3, al-Lahab: 2

³⁷ Diriwayatkan Muhammad bin Ishaq, Abu Bakar melihat Bilal Bin Rabah yang disiksa di tempat yang panas dan cara ditindih batu agar ia mengingkari Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad saw, langkah yang diambil Abu Bakar adalah menjual perhiasan untuk memerdekakan Bilal, hal ini mendapat pujian dari Allah swt. Meskipun kisah tersebut dianggap sebagai kekhususan namun berlaku untuk umum, lihat. Al-Baghawiy, *Ma'alīm al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān* (Beirut: Ihyā' al-Turath, 1420H), Jilid v, 264.

³⁸ Muhyiddin Abdul Qadir Jaelani, *Tafsīr al-Jilānīy* (Beirut: Syirkah Tamam, 2009) Jilid. vi, 382.

Islam bersifat unik, karena berada dalam dua irisan pemikiran antara sosialis dan kapitalis. Mungkin dapat dipetakan secara sederhana sebagaimana gambar di bawah ini:



Keberadaan kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam berada di antara irisan dua kutub pemikiran sosialis dan kapitalis. Artinya, di samping mengakui dan kepemilikan individu, juga bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan bersama. Disitulah keunikan kepemilikan dalam Islam. Tidak sosialis dan tidak kapitalis.

Sistem kepemilikan dalam Islam menurut beberapa ekonom muslim mengambil corak tersendiri yakni sosialisme plus nilai-nilai religius, sebagaimana kesimpulan para pemikir Islam seperti, Baqir Shadr, Hossein Nasr, Umer Chapra, Abdul Mannan, Yusuf Qardhawi, Taqiyuddin an-Nabhani dan Hasan Hanafi. Berangkat dari ide kepemilikan tersebut didapat pemahaman yang lebih universal dalam mendudukan posisi ayat *māl* dalam tafsir sebagai landasan ide awal dimana ayat ayat filantropi berpijak.

Ayatullah Khomaeni berpendapat, kepemilikan Islam berbeda dengan kepemilikan kapitalis maupun sosialis,³⁹ keduanya tidak bisa disatukan, karena keduanya di dasarkan atas pandangan skuler yang berorientasi modal.⁴⁰ Adapun prinsip kepemilikan Islam dibangun atas dasar teologis, amanah, adil dan berkeseimbangan antara pemenuhan pribadi dan sosial,⁴¹ dalam fungsi sosialnya tidak semata mata untuk memperkaya diri, menghisap orang lain atau memperhambanya.⁴² Harta milik pribadi (*private property*) dalam Islam bukan kepemilikan yang absolut, melainkan ada tuntutan moral spiritual dalam distribusinya kepada orang yang membutuhkan,⁴³ berbeda dengan John Lock yang berprinsip, setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas

³⁹ Santoso, Ery Wibowo Agung, "Ekonomi Islam Dalam Konteks Ke-Indonesia-an (Perspektif Jalan Ketiga)." *Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, vol.8, no.1 (2011), 5.

⁴⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), 13.

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (terj.) Didin Hafidudin, Jakarta Rabbani Press, 1977, cet. 1, 14. Lihat juga. QS. al Baqarah:30, al-Naml: 62.

⁴² M.A, Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek.*, 338.

⁴³ QS. al Ma'arij: 25-26 dan QS. al-Tawbah: 103.

kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas kerja yang berasal dari tubuhnya.⁴⁴ Termasuk kepada harta miliknya yang bersifat absolut.

Konsepsi fungsi sosial harta seperti zakat, infak, maupun sedekah adalah konsep penting yang digadang-gadang sebagai solusi menciptakan kesejahteraan. serta menghindarkan penumpukan harta pribadi secara berlebihan. Saking pentingnya hingga zakat, tak kurang dari 26 kali dalam al-Qur'an disandingkan dengan perintah sholat.⁴⁵ Pesan intrinsik yang dapat diambil dari pengulangan tersebut ialah sholat sebagai penyucian jiwa sedang zakat sebagai bentuk penyucian harta. Namun perlu diingat bahwa zakat menurut Asdar Yusuf adalah batas minimal (*nishāb*) yang harus dibagi dari harta milik yang sah. Lagi lagi kesan yang ditangkap adalah sistem Islam berbeda dengan sistem Islam sosialis maupun kapitalis, tak berlebihan bila kemudian dikenal dengan istilah sosialisme Islam.⁴⁶

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*. Posisi kepemilikan dalam Islam menurut sarjana muslim, berada diantara dua kutub pemikiran antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. *Kedua*, secara struktur kalimat dalam al Qur'an, dalam hal ini ayat *māl* –representasi dari ayat ekonomi-- ada kesan bahwa kepemilikan dalam Islam lebih dekat dengan sosialis, oleh karena itu, tak berlebihan bila kemudian, kepemilikan dalam Islam disebut sebagai sosialisme Islam atau sosialisme religius.

Penulis harus akui, masih butuh sekian argumen untuk menetapkan posisi kepemilikan dalam konsep ekonomi Islam. Namun setidaknya, makalah ini dianggap cukup untuk memantik semangat kajian diskursus ekonomi Islam. Kritik konstruktif sangat diharapkan untuk melengkapi beberapa hal yang masih belum terisi.

⁴⁴ Anwar Abbas, "Sistem Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Filsafat." *al-Iqtishad*, Vol. iv, No. 1, (Januari 2012), 115.

⁴⁵ M. Fuad Abd Baqiy, *al-Mu'jām al-Mufahrasy li al-fāḍ al-Qur'ān al-Karīm.*, 331-332.

⁴⁶ Konsep hak milik pribadi dalam Islam bersofat unik, meyakini bahwa hakekat semua harta adalah milik Allah, manusia hanya diberi mandat untuk mengaturnya sebagai implementasi atas tugas kehalifahan yang dibebankan kepada manusia. Lihat Asdar Yusuf, "Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi)." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, vol.11, No.2 (2014), 232.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. "Sistem Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Filsafat." *al-Iqtishad*, Vol. iv, No. 1, Januari, 2012.
- Abd Baqiy, M. Fuad. *al-Mu'jām al-Mufahras li alfāḍ al-Qur'āni al-Karīm*. Mesir: Dār al-Kutub, 1945.
- Abdurrahman, Sa'id. *Musykilāt al-faqr*. Riyadh: Dirasāt al-amniyah, 1411 M.
- Abidin, Ibnu. *Hashiyah Raddul Mukhtar*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Ahmad, M, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- al Barkati, Muhammad Amim Ihsan al Mujaddidi. *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-'Akabiri, Muhibuddin. *al-Lubāb fī 'Ilal al-Bina' wa al-I'rāb*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1995.
- al-Anbari, Abi Sa'id. *Asrār al-'Arabiyyah*. Beirut: Dār al-Arqam, 1999.
- Al-Baghawiy. *Ma'alīm al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Ihyā' al-Turath, 1420 H.
- al-Khafifi, Ali. *Mukhtaṣar Ahkām al-Mu'āmalah as-Syar'iyyah*. Kairo: Maṭba'ah, 1952, 9
- Al-Mabarrad. Abul Abbas. *al-Muqtaḍab*. Beirut: 'Alam al-Kutub, tt.
- Al-Saigh, Syamsuddin. *al-Lumḥah fī Syarh al-Mulhah*. Madinah: Imadah al-Baḥs al-Ilmi, 2004.
- al-Zujaji, Abu Qasim. *al-Lāmāt*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985 M.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. *an-Nizhām al Iqtisādi fī al-Islam*. Beirut: Dr al ummah, 2004.
- Black, Henry Cambell. *Black's Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Publishing.co, 1998.
- Fazlurrahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994.
- Hanafī, Hasan. *ad-Dīn wa al-Thawrah fī Miṣr, (1952-1981); Al-Yamīn al-Yasār fī al-Fikr al-Dīnī*. Kairo: Maktabah Madbūlī, tt.
- Haroen, Nasroen Haroen. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibn Jauzi, Abul Faraj. *Zādul Masīr fī 'Ilmi at-Tafsīr*. Beirut: Dār al-Kutub, 1422 H.
- Jamaluddin, Abdullah. *Syarh Tashīl al-Fawāid*. tahqīq. Abdurrahman al-Sayyid,(ttp: Hajar, 1990.

- Jilani, Muhyiddin Abdul Qadir. *Tafsīr al-Jīlāniy*. Beirut: Syirkah Tamam, 2009.
- Labib, S. Rahmat. *Privatisasi dalam Pandangan Islam*. Tangerang: WADI Press, 2005.
- Mannan, M.A. *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, (terj). Potan Arif Harahap, Jakarta: Intermasa, 1992.
- Najiy, Badruddin. *Mabāḥith fī Tafsīr al-Mauḍu'ī*. Suriah: Baromalah, tt.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia."
- Qaradhawiy, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (terj.) Didin Hafidudin, Jakarta Rabbani Press, 1977
- Rizal," Eksistensi Harta Dalam Islam." *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari, 2015
- Santoso, Ery Wibowo Agung, "Ekonomi Islam Dalam Konteks Ke-Indonesiaan (Perspektif Jalan Ketiga)." *Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 8, no.1 2011.
- Shihab, M. Quraish Shihab. *membumikan al Qur'an*. Jakarta: Penerbit Mizan, 1998
- Shihab, M. Qurasih. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013
- Soetrisno, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992
- Suzeno, Fran Magnis (ed.) *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: P.T Gramedia, 1999.
- Syahin, Dr. Musa. *al-Māl fī al-Qur'ān wa al-Sunnah*, tt. (naskah tidak dipublikasikan)
- Tim penyusun P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo, 2011.
- Yusuf, Asdar "Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, vol.11, No.2, 2014.
- Zakariya, Husein Ahmad Faris bin. *Mu'jam Maqāyis fī al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Beirut: Dārul al-Fikr, 1985.